



## **PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN BATUJAJAR**

**Sesiana Meila Antamevia<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh aparatur desa di wilayah Kecamatan Batujajar yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu dalam implementasi pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan hal tersebut menyebabkan terhambatnya program atau kegiatan pembangunan desa sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 56 responden dengan menggunakan simple random sampling. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan hasil koefisien determinasi 41,0% sedangkan 59,0% nya dipengaruhi oleh variabel lain dari model penelitian. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pemerintah desa mengelola dana Desa dengan baik, termasuk efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

### **Abstract**

*This study aims to determine how much influence the implementation of the internal control system has on the accountability of village fund management. This research approach uses a quantitative approach by distributing questionnaires to all village officials in the Batujajar District area who are involved in managing village funds. The problem in this study is that the implementation of Village Fund management still faces various challenges, this has hampered village development programs or*

*activities resulting in a decrease in the quality of services provided to the community. The number of samples in this study were 56 respondents using simple random sampling. The results of the t test analysis show that the application of the internal control system has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, and the results of the coefficient of determination are 41.0% while 59.0% is influenced by other variables outside of the research model. Efforts that can be made, namely an effective internal control system can help village governments manage Village Funds properly, including effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Implementation of Internal Control System, Accountability, Village Fund Management*

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam kemajuan pembangunan nasional. Pemerintah menginisiasi program Dana Desa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengakselerasi pembangunan di desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa tersebut melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Dana yang dialokasikan untuk desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk mendukung operasional pemerintah desa, pembangunan desa, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat, tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaannya juga semakin tinggi. Besarnya alokasi anggaran ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang ketat serta pelaporan yang jelas atas penggunaan Dana Desa. Akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, untuk memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa dimanfaatkan secara efektif, efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memaksimalkan dampak positif dari Dana Desa bagi kemajuan pedesaan di Indonesia. Pengelolaan Dana

Desa oleh aparaturnya perlu dilaksanakan secara sistematis, terbuka, melibatkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan (Martini et al, 2019). Akuntabilitas sangat penting sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program kerja pemerintah (Aziz et al, 2019).

Menurut Spencer dalam (Raba, 2020:66) menyatakan bahwa akuntabilitas seringkali dianggap sebagai bentuk operasional dari tanggung jawab (responsibilitas), karena keduanya sangat terkait. Artinya, setiap aparat pemerintah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, dan produktif, dengan tetap menjaga kelancaran dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Mereka harus mengelola tugas-tugas tersebut secara profesional dan dapat dipercaya dalam menjalankan berbagai peran.

Menurut David Halmer dan Mark Turner dalam (Raba, 2020:102) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang kompleks dan memiliki enam dimensi untuk mengukur seberapa prinsip akuntabilitas diterapkan, yaitu : 1) legitimasi pembuat kebijakan, 2) Moral, 3) Responsivitas, 4) Keterbukaan, 5) Penggunaan sumber secara optimal, dan 6) Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi.

Meskipun akuntabilitas menjadi aspek krusial, implementasinya dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas terkait transparansi dan pertanggungjawaban. Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan bahwa adanya temuan masalah di berbagai daerah yang sering terjadi terhadap pengelolaan dana desa, yaitu

keterlambatan penyaluran Dana Desa yang disebabkan oleh fakta bahwa dokumen pertanggungjawaban terlambat dilaporkan oleh desa (BPK RI, 2022).

Permasalahan tersebut menyebabkan terhambatnya program atau kegiatan pembangunan desa sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban dalam melaporkan realisasi APBDes dan RKPDes merupakan tahapan yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melaporkan hasil APBDes dan RKPDes merupakan proses yang bukan sekedar formalitas administratif, melainkan merupakan bukti komitmen pemerintah desa terhadap tanggungjawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah desa yang melaporkan secara akurat dan tepat waktu menunjukkan bagaimana Dana Desa digunakan sesuai dengan rencana dan seberapa jauh tujuan pembangunan telah dicapai. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai apakah penggunaan sumber daya desa efektif dan efisien. Selain itu, pelaporan yang efektif membantu evaluasi di siklus perencanaan dan penganggaran berikutnya. Oleh karena itu, laporan tentang pelaksanaan APBDes dan RKPDes tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan dalam tata kelola yang baik dalam pembangunan desa.

Untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujajar, Peneliti telah melakukan pra survei melalui

wawancara informal dengan beberapa Sekretaris Desa, dari pra survei menunjukkan beberapa temuan penting mengenai permasalahan dalam pengelolaan dana desa, yaitu terdapat permasalahan terkait perubahan regulasi setiap tahunnya yang mengakibatkan memiliki banyak konsekuensi. Perubahan ini mencakup berbagai aspek mulai dari prosedur perencanaan, mekanisme penganggaran, hingga sistem pelaporan dan evaluasi. Meskipun perubahan regulasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan desa, perubahan ini seringkali menimbulkan tantangan untuk pemerintah desa.

Tantangan yang dihadapi pemerintah desa yaitu kurang memahami dan menyesuaikan dengan regulasi baru. Aparatur desa seringkali menjadikan kegiatan pembangunan desa di tahun sebelumnya sebagai acuan perencanaan di tahun berikutnya, sebagai sebuah praktik untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan desa. Akan tetapi, dengan adanya perubahan regulasi aparatur desa tidak bisa melaksanakan program pembangunan sesuai dengan perencanaan karena aparatur desa membutuhkan waktu untuk mengevaluasi kembali perencanaan kegiatan yang mengakibatkan tertundanya implementasi program pembangunan desa.

Keterlambatan realisasi APBDes dan kurangnya penguatan regulasi dapat mengakibatkan serangkaian dampak negatif yang saling terkait pada berbagai aspek pembangunan dan tata kelola desa. Mulai dari terhambatnya program pembangunan hingga penurunan kualitas hidup masyarakat, permasalahan ini berpotensi mengganggu Alokasi Dana Desa dan perencanaan anggaran jangka panjang. Lebih lanjut, hal ini dapat mengikis akuntabilitas dan kepercayaan publik, serta meningkatkan risiko pelanggaran hukum dan sanksi administratif. Ketidakstabilan ini

juga mengancam keberlanjutan program pembangunan dan dapat memicu ketidakpuasan serta konflik sosial dalam masyarakat. Secara keseluruhan, jika tidak segera di atasi, permasalahan ini dapat menghambat pembangunan desa secara signifikan, mengurangi efektivitas penggunaan dana desa, serta menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan dan pembangunan desa dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pengelolaan Dana Desa memerlukan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu elemen penting dari pemerintahan yang baik, yang menunjukkan seberapa baik pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas mengacu pada kesadaran bahwa setiap individu, kelompok, atau organisasi memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan. Akuntabilitas digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan rencana dan tujuan strategik organisasi pemerintah untuk berjalan secara efektif dan efisien. Dalam sebuah pemerintahan akuntabilitas menunjukkan bahwa aparatur memiliki kontrol penuh atas semua tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas menunjukkan bahwa laporan yang tepat dan akurat diperlukan untuk tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal memegang peranan penting. Sistem pengendalian internal ini mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pemerintah desa mengelola Dana Desa dengan baik, termasuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut PP No 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan”.

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015), ada 5 elemen utama yang dapat membentuk sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu : 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Resiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, 5) Pemantauan Pengendalian Internal. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat memperkuat tata Kelola yang baik, mengurangi risiko penyimpangan, dan meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas bagaimana gambaran pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internal, dan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian dalam pembahasan ini menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pembahasan ini dimunculkan melalui perhitungan tabulasi excel dan SPSS.

**Tabel 1 Hasil Uji Analisis Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	56	1	5	4.25	.919
X2	56	2	5	4.21	.803
X3	56	1	5	4.23	.763
X4	56	1	5	4.20	.796
X5	56	3	5	4.14	.586
X6	56	2	5	3.93	.710
X7	56	2	5	4.02	.674
X8	56	2	5	4.16	.654
X9	56	2	5	4.14	.773
X10	56	2	5	4.20	.724
X11	56	2	5	4.29	.780
X12	56	2	5	4.16	.654
X13	56	1	5	4.14	.862
X14	56	2	5	4.20	.672
Valid N (listwise)	56				

*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai mean statistics sebesar 3,93 hingga 4,29 dengan total rata-rata dari nilai tersebut adalah 4,16 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai penerapan sistem pengendalian internal di wilayah Kecamatan Batujajar adalah baik.

**Tabel 2 Hasil Uji Analisis Deskriptif Variabel Y**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	56	1	5	4.02	.963
Y2	56	1	5	4.20	.883
Y3	56	2	5	4.27	.726
Y4	56	2	5	4.18	.716
Y5	56	3	5	4.23	.539
Y6	56	2	5	4.12	.715
Y7	56	2	5	4.14	.645
Y8	56	2	5	4.13	.634
Y9	56	2	5	4.16	.626
Y10	56	2	5	4.13	.715
Valid N (listwise)	56				

*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan nilai mean statistic sebesar 4,02 hingga 4,27 dengan total rata-rata dari nilai tersebut 3,9 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Batujajar adalah sedang.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.15832729
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.060
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024*

Berdasarkan di atas diketahui hasil dari pengujian normalitas yang menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,096, nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat diartikan pada analisis ini data berdistribusi normal.

**Tabel 4 Hasil Uji Linearitas**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas Pegelolaan Dana Desa *	Between Groups	(Combined) Linearity	592.110	19	31.164	3.323	.001
		Deviation from Linearity	381.088	1	381.088	40.637	.000
	Within Groups		211.022	18	11.723	1.250	.276
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	Total		337.605	36	9.378		
			929.714	55			

*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024*

Hasil output uji linearitas dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai signifikansi *Deviation from Linearity* antara variabel penerapan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sebesar 0,276. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi > 0,05 maka korelasi variabel independen terhadap variabel dependen memiliki hubungan yang linear.

**Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.965	4.040		4.199	.000
Penerapan Sistem Pengendalian Internal	.422	.069	.640	6.125	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh model

persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 16,965 + 0,422 X_1 + \varepsilon$$

Kemudian interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan persamaan diatas nilai konstanta (a) adalah 16,965 yang berarti jika variabel penerapan sistem pengendalian internal mempunyai nilai = 0 maka akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 16,965.
2. Nilai koefisien variabel penerapan sistem pengendalian internal (X) adalah 0,422 artinya jika penerapan sistem pengendalian internal mengalami kenaikan sebesar 1 maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,422. Koefisien regresi bernilai positif antara penerapan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan apabila penerapan sistem pengendalian internal semakin meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa pun akan semakin meningkat.

**Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 <sup>a</sup>	.410	.399	3.18744

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pegelolaan Dana Desa

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024

Nilai tersebut menjelaskan bahwa besarnya pengaruh variable penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,410 (41,0%) sedangkan 59,0% nya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian.

**Tabel 6 Hasil Uji T**

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.965	4.040		4.199	.000
	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	.422	.069	.640	6.125	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  
*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024*

1. Hasil pengujian pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,125 dan  $t_{tabel}$  2,004 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  serta diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hipotesis dapat diartikan  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel penerapan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi skor, pengukurang yang dilakukan melalui skala likert dengan variabel penerapan sistem pengendalian internal di wilayah kecamatan batujajar berada pada kategori setuju. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel penerapan sistem pengendalian internal diperoleh nilai persentase rata-rata sebesar 4,9 yang artinya masuk dalam

kategori baik berada pada kisaran rentang skor 3,41-4,20. Artinya penerapan sistem pengendalian internal di wilayah kecamatan batujajar yang dijalankan menurut pandangan serta tanggapan responden adalah sudah sepenuhnya sesuai harapan.

2. Berdasarkan hasil perhitungan tabulasi skor total, pengukuran yang dilakukan melalui skala likert dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah kecamatan berada pada kategori netral. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di peroleh hasil skor 3,9 yang artinya masuk dalam kategori sedang berada pada kisaran rentang skor 2,61-3,40. Artinya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dijalankan menurut pandangan serta tanggapan responden adalah belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sesuai harapan.
3. Hasil uji koefisien regresi diketahui terdapat persamaan regresi  $Y = 16,965 + 0,422 X_1 + \epsilon$ , yang berarti pengaruh variabel X (penerapan sistem pengendalian internal) terhadap variabel Y (akuntabilitas pengelolaan dana desa) adalah berpengaruh positif, melalui adanya kenaikan atau perubahan dari penerapan sistem pengendalian internal yang diikuti dengan kenaikan atau perubahan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan perhitungan besarnya nilai koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada kolom *R Square* yaitu sebesar 0,410. Nilai tersebut menjelaskan bahwa besarnya pengaruh variabel penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,410 (41,0%) sedangkan 59,0% nya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Raba, Manggaukang. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Handiyono, V. J., & Lutfi, A. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Desa Tambun Dan Desa Segarajaya). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 101-119.
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 19(4).